

Pendidikan Antikorupsi dan Dampaknya Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa PPKN Universitas Pamulang: Sebuah Studi Lapangan

Asha Leona Amanta

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: ashaleona3@gmail.com

ANALYSIS:
Journal of
Education
Vol. 4 No. 1
2026

Abstrak: Jurnal ini menganalisis dampak Pendidikan Antikorupsi terhadap pembentukan karakter mahasiswa serta kendala dalam implementasinya di Program Studi PPKn Universitas Pamulang. Sebagai calon pendidik dan agen perubahan sosial, mahasiswa PPKn diharapkan memiliki integritas dan kesadaran etis yang kuat. Setelah kebijakan integrasi Pendidikan Antikorupsi diterapkan dalam kurikulum, muncul berbagai dinamika dalam proses internalisasi nilai. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi perkuliahan, dan dokumentasi tugas mahasiswa, penelitian ini menemukan bahwa Pendidikan Antikorupsi berperan penting dalam membentuk kejujuran akademik, kedisiplinan, tanggung jawab moral, serta keberanian menolak praktik kecurangan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti budaya permisif di lingkungan kampus, metode pembelajaran yang cenderung teoritis, evaluasi yang masih fokus pada ranah kognitif, serta dukungan institusi yang belum optimal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana Pendidikan Antikorupsi dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat karakter antikorupsi mahasiswa di perguruan tinggi. Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi, Integritas, Karakter Mahasiswa, Budaya Akademik

Abstract: *This journal analyzes the impact of Anti-Corruption Education on the character formation of students as well as the challenges encountered in its implementation within the Civic Education (PPKn) Study Program at Universitas Pamulang. As prospective educators and agents of social change, PPKn students are expected to possess strong integrity and ethical awareness. Since the integration of Anti-Corruption Education into the curriculum, various dynamics have emerged in the process of internalizing these values. Using a qualitative approach through in-depth interviews, classroom observations, and documentation of student assignments, this study found that Anti-Corruption Education plays a significant role in shaping academic honesty, discipline, moral responsibility, and the courage to reject unethical practices. However, its implementation still faces several obstacles, including a permissive academic culture, learning methods that remain largely theoretical, evaluation systems that focus predominantly on cognitive aspects, and institutional support that has not yet been maximized. The findings of this study are expected to provide deeper insights*

into how Anti-Corruption Education can serve as an effective strategy for strengthening anti-corruption character among university students.

Keywords: Anti-Corruption Education, Integrity, Student Character, Academic Culture

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling kompleks dan serius yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat, melemahkan legitimasi pemerintahan, serta menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Lebih jauh lagi, korupsi mengikis karakter bangsa dan merusak nilai-nilai integritas yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif yang berorientasi pada pembentukan karakter sejak dini. Pendidikan menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam proses tersebut.

Pada tingkat pendidikan tinggi, fenomena korupsi dalam skala kecil atau korupsi mikro sering kali ditemukan dan dinormalisasi tanpa disadari oleh mahasiswa. Perilaku seperti menyontek saat ujian, titip absen, plagiarisme, manipulasi data penelitian, hingga kerja sama tidak jujur dalam tugas kelompok, merupakan bentuk-bentuk kecurangan yang tampak sepele namun berpotensi berkembang menjadi perilaku koruptif dalam skala lebih besar. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya integritas akademik, tetapi juga menjadi indikator awal dari budaya permisif terhadap korupsi. Dengan demikian, dunia kampus tidak terbebas dari problem korupsi, bahkan sering kali menjadi tempat di mana bibit korupsi tumbuh melalui tindakan-tindakan kecil yang jarang dianggap sebagai masalah.

Oleh sebab itu, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam membangun budaya antikorupsi melalui internalisasi nilai-nilai integritas dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu upaya konkret untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kedisiplinan, dan keberanian moral pada mahasiswa. Program ini tidak sekadar memberikan pengetahuan teoretis tentang definisi korupsi dan regulasi hukum, tetapi juga bertujuan membentuk karakter mahasiswa agar mampu menghindari, menolak, serta melawan praktik korupsi dalam kehidupan akademik maupun sosial. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai integritas dan etika publik.

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Pamulang memiliki posisi strategis dalam isu ini, karena mereka merupakan calon pendidik yang kelak akan menjadi aktor penting dalam proses pendidikan karakter di sekolah. Sebagai calon guru PPKn, mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai teori kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga untuk menjadi role model dalam aspek moral dan integritas. Guru PPKn memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada peserta didik, sehingga pembentukan karakter antikorupsi pada mahasiswa PPKn menjadi sangat relevan dan signifikan. Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi bukan hanya menjadi mata kuliah wajib, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas profesional mahasiswa sebagai calon pendidik yang berintegritas.

Namun demikian, implementasi Pendidikan Antikorupsi bukan tanpa tantangan. Realitas menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai tidak dapat berjalan efektif apabila tidak didukung oleh ekosistem kampus yang kondusif. Budaya permisif yang masih cukup kuat, seperti anggapan bahwa kecurangan kecil merupakan hal wajar, menjadi salah satu hambatan utama. Tekanan kelompok teman sebaya juga sering kali membuat mahasiswa sulit menolak ajakan untuk melakukan tindakan tidak jujur. Di sisi lain, metode pembelajaran yang terlalu teoritis sering kali membuat mahasiswa kesulitan menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Ketika pembelajaran hanya berfokus pada hafalan konsep dan definisi hukum, tanpa memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengalami, merasakan, dan menganalisis dilema etis secara langsung, maka tujuan internalisasi nilai akan sulit dicapai.

Selain itu, tantangan juga muncul dari sistem evaluasi karakter yang belum optimal. Penilaian akademik di perguruan tinggi cenderung fokus pada aspek kognitif, sementara perubahan sikap dan perilaku mahasiswa, yang seharusnya menjadi inti dari Pendidikan Antikorupsi, tidak selalu mendapat perhatian serius. Perubahan sikap moral merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan evaluasi berkelanjutan, observasi langsung, refleksi diri, serta instrumen pengukuran karakter yang komprehensif. Jika evaluasi hanya menilai kemampuan menjawab soal tentang jenis-jenis korupsi, maka tujuan utama Pendidikan Antikorupsi akan sulit tercapai.

Dukungan institusi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Pendidikan Antikorupsi memerlukan kolaborasi antara dosen, program studi, fakultas, organisasi mahasiswa, dan pihak kampus secara keseluruhan. Kegiatan seperti seminar antikorupsi, kampanye integritas, lomba poster atau video edukasi, serta kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah strategis untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kampus. Tanpa dukungan struktural yang kuat, pembelajaran nilai antikorupsi akan berhenti pada ruang kelas dan tidak merembes ke dalam kehidupan sosial mahasiswa.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana dampak Pendidikan Antikorupsi terhadap pembentukan karakter mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang?
Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pembelajaran antikorupsi berpengaruh pada aspek kejujuran akademik, kedisiplinan, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tersebut.
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan kampus?
Pertanyaan ini menggali faktor-faktor penghambat seperti budaya, metode pembelajaran, sistem evaluasi, dan dukungan institusional.

Dengan mengkaji dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas Pendidikan Antikorupsi serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas implementasinya di perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam pengalaman subjektif mahasiswa dan dosen terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi. Pendekatan ini dipilih untuk menggali aspek-aspek non-kuantitatif seperti perubahan sikap, persepsi, motivasi,

dan perilaku mahasiswa yang tidak dapat diukur melalui instrumen angka atau survei. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menangkap makna di balik tindakan mahasiswa, memahami dinamika interaksi selama pembelajaran, serta menelusuri proses internalisasi nilai integritas secara komprehensif. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami fenomena penelitian. Terdapat 12 informan utama yang terlibat, terdiri atas dua dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi (HK dan SKS) yang memberikan perspektif pedagogis dan pengalaman langsung selama proses pembelajaran, serta sepuluh mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang dengan latar belakang akademik berbeda, tingkat partisipasi beragam, dan pengalaman langsung mengikuti mata kuliah tersebut. Variasi informan ini dipilih agar data yang diperoleh kaya, beragam, dan dapat menggambarkan realitas implementasi Pendidikan Antikorupsi secara lebih utuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan selama 25–45 menit untuk setiap informan, dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang fleksibel agar informan dapat mengeksplorasi pengalaman mereka secara bebas. Pertanyaan wawancara berfokus pada persepsi mahasiswa mengenai makna korupsi, pengalaman perubahan perilaku setelah mengikuti perkuliahan, tantangan dalam menerapkan nilai integritas, penilaian terhadap metode pembelajaran, dan harapan terhadap penguatan Pendidikan Antikorupsi. Wawancara direkam dan ditranskripsikan secara lengkap untuk dianalisis lebih lanjut. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif selama satu semester pada beberapa sesi perkuliahan penting. Observasi difokuskan pada dinamika kelas, kedisiplinan, kejujuran akademik, partisipasi mahasiswa dalam diskusi dilema etis, respons terhadap studi kasus korupsi, perilaku mahasiswa dalam kerja kelompok dan tugas individu, serta pola interaksi mahasiswa-dosen. Seluruh temuan observasi dicatat dalam bentuk field notes yang berfungsi sebagai data pendukung hasil wawancara.

Dokumentasi juga menjadi teknik penting dalam penelitian ini, mencakup tugas individu, proyek analisis kasus korupsi, jurnal refleksi perkembangan karakter mahasiswa, foto-foto kegiatan pembelajaran, rekaman presentasi kelompok, serta lembar penilaian dosen. Data dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti konkret untuk mengonfirmasi perubahan sikap dan perilaku mahasiswa sekaligus menguatkan data hasil wawancara dan observasi. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyaring, dan mengelompokkan data sesuai tema tertentu. Pada tahap ini, peneliti membuat kode tematik seperti “kejujuran akademik”, “kedisiplinan”, “tanggung jawab sosial”, “keberanian menolak kecurangan”, dan “budaya permisif”. Tahap kedua yaitu penyajian data, dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, matriks tematik, serta kutipan langsung informan untuk menggambarkan pola temuan secara jelas. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif berdasarkan pola makna, kecenderungan sikap, dan proses perubahan yang tampak dari keseluruhan data lapangan.

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat teknik utama, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan peer debriefing. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari dosen dan mahasiswa, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan dengan meminta beberapa informan meninjau kembali hasil temuan

penelitian agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Selain itu, peneliti juga melakukan peer debriefing dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan temuan serta meminimalisasi bias penafsiran. Melalui langkah-langkah validasi tersebut, temuan penelitian dapat dipastikan memiliki tingkat kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Antikorupsi di Program Studi PPKn Universitas Pamulang memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala struktural maupun kultural. Temuan utama penelitian ini berkaitan dengan perubahan sikap mahasiswa pada empat aspek inti, yaitu kejujuran akademik, kedisiplinan, tanggung jawab moral, dan keberanian menolak praktik kecurangan. Perubahan tersebut diperoleh melalui proses internalisasi nilai yang berlangsung selama satu semester pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, observasi kelas, dan analisis dokumentasi, mahasiswa menyatakan bahwa sebelum mengikuti mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, tindakan seperti menyontek, titip absen, dan plagiarisme masih dianggap hal lumrah dan bukan termasuk tindakan koruptif. Namun, setelah mempelajari konsep korupsi secara filosofis, yuridis, dan etis, pandangan mahasiswa mengalami pergeseran. Mereka mulai memahami bahwa korupsi tidak hanya berupa tindakan besar yang melibatkan pejabat publik, tetapi juga tercermin dalam tindakan kecil yang melanggar integritas. Perubahan pemahaman ini terlihat dari meningkatnya kesadaran mahasiswa dalam menjaga kejujuran akademik, penggunaan sitasi yang benar, dan penurunan perilaku titip absen yang diamati selama proses observasi.

Selain aspek kejujuran, Pendidikan Antikorupsi juga berdampak pada peningkatan kedisiplinan mahasiswa. Mahasiswa mulai memaknai kedisiplinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari komitmen moral untuk bertindak konsisten sesuai nilai integritas. Hal ini terlihat dari meningkatnya ketepatan waktu dalam kehadiran dan pengumpulan tugas. Observasi menunjukkan mahasiswa lebih serius mengikuti pembelajaran, aktif dalam diskusi, dan berusaha memberikan kontribusi yang relevan dalam kajian kasus. Tanggung jawab moral mahasiswa juga mengalami perkembangan, terutama ketika mereka dihadapkan pada analisis kasus korupsi dana bansos, korupsi pendidikan, dan praktik nepotisme. Mahasiswa mulai menyadari bahwa korupsi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok miskin. Pemahaman ini membangun kesadaran kritis bahwa sebagai calon pendidik, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada peserta didik di masa depan. Mahasiswa juga mengungkapkan bahwa Pendidikan Antikorupsi membuat mereka lebih peduli terhadap keadilan sosial dan keberlangsungan pembangunan.

Temuan lainnya mengungkapkan bahwa dampak paling kuat dari pembelajaran ini adalah tumbuhnya keberanian moral mahasiswa untuk menolak tindakan curang. Banyak mahasiswa yang sebelumnya cenderung mengikuti arus kelompok, kini berani mengatakan “tidak” pada ajakan untuk menyontek atau titip absen. Mereka juga mulai berani mengingatkan teman-temannya ketika melakukan penyimpangan kecil. Para dosen menilai bahwa mahasiswa menjadi lebih kritis dan berani mengungkapkan pendapat dalam diskusi tentang dilema etis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter antikorupsi berbasis dialog dan refleksi mampu menumbuhkan moral courage sebagai fondasi penting bagi generasi pendidik masa depan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala yang menghambat implementasi Pendidikan Antikorupsi secara optimal. Kendala pertama adalah budaya permisif di lingkungan kampus. Meskipun kesadaran mahasiswa meningkat, sebagian mahasiswa masih menganggap beberapa bentuk kecurangan, seperti titip absen atau berbagi jawaban saat ujian, sebagai hal yang wajar. Tekanan dari kelompok sebaya juga membuat sebagian mahasiswa ragu untuk menolak ajakan melakukan pelanggaran. Kendala kedua adalah metode pembelajaran yang dinilai masih terlalu teoritis. Mahasiswa menginginkan pembelajaran yang lebih aplikatif, seperti role play dilema etis, analisis kasus nyata dari KPK, simulasi pengambilan keputusan moral, atau menghadirkan narasumber praktisi antikorupsi. Minimnya variasi metode membuat internalisasi nilai terkadang tidak maksimal. Kendala ketiga berkaitan dengan sistem evaluasi, di mana dosen lebih menekankan penilaian kognitif dibandingkan penilaian afektif atau perubahan karakter. Penilaian karakter membutuhkan instrumen yang lebih kompleks seperti jurnal refleksi, observasi perilaku, dan portofolio etika, yang belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Kendala terakhir adalah lemahnya dukungan institusional. Mahasiswa berharap kampus lebih aktif menyelenggarakan seminar, workshop, kampanye integritas, serta memberikan sanksi akademik yang tegas terhadap pelanggaran kejujuran untuk menciptakan budaya antikorupsi yang kuat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan bahwa Pendidikan Antikorupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa, terutama dalam aspek integritas dan tanggung jawab moral. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh budaya kampus, metode pengajaran, evaluasi karakter, dan komitmen institusi. Dengan memperkuat faktor pendukung tersebut, Pendidikan Antikorupsi memiliki potensi besar untuk menjadi strategi utama dalam membangun generasi muda yang berintegritas tinggi dan mampu menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi sejak tingkat pendidikan tinggi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Antikorupsi di Program Studi PPKn Universitas Pamulang memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala struktural maupun kultural. Temuan utama penelitian ini berkaitan dengan perubahan sikap mahasiswa pada empat aspek inti, yaitu kejujuran akademik, kedisiplinan, tanggung jawab moral, dan keberanian menolak praktik kecurangan. Perubahan tersebut diperoleh melalui proses internalisasi nilai yang berlangsung selama satu semester pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, observasi kelas, dan analisis dokumentasi, mahasiswa menyatakan bahwa sebelum mengikuti mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, tindakan seperti menyontek, titip absen, dan plagiarisme masih dianggap hal lumrah dan bukan termasuk tindakan koruptif. Namun, setelah mempelajari konsep korupsi secara filosofis, yuridis, dan etis, pandangan mahasiswa mengalami pergeseran. Mereka mulai memahami bahwa korupsi tidak hanya berupa tindakan besar yang melibatkan pejabat publik, tetapi juga tercermin dalam tindakan kecil yang melanggar integritas. Perubahan pemahaman ini terlihat dari meningkatnya kesadaran mahasiswa dalam menjaga kejujuran akademik, penggunaan sitasi yang benar, dan penurunan perilaku titip absen yang diamati selama proses observasi.

Selain aspek kejujuran, Pendidikan Antikorupsi juga berdampak pada peningkatan kedisiplinan mahasiswa. Mahasiswa mulai memaknai kedisiplinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari komitmen moral

untuk bertindak konsisten sesuai nilai integritas. Hal ini terlihat dari meningkatnya ketepatan waktu dalam kehadiran dan pengumpulan tugas. Observasi menunjukkan mahasiswa lebih serius mengikuti pembelajaran, aktif dalam diskusi, dan berusaha memberikan kontribusi yang relevan dalam kajian kasus. Tanggung jawab moral mahasiswa juga mengalami perkembangan, terutama ketika mereka dihadapkan pada analisis kasus korupsi dana bansos, korupsi pendidikan, dan praktik nepotisme. Mahasiswa mulai menyadari bahwa korupsi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok miskin. Pemahaman ini membangun kesadaran kritis bahwa sebagai calon pendidik, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada peserta didik di masa depan. Mahasiswa juga mengungkapkan bahwa Pendidikan Antikorupsi membuat mereka lebih peduli terhadap keadilan sosial dan keberlangsungan pembangunan.

Temuan lainnya mengungkapkan bahwa dampak paling kuat dari pembelajaran ini adalah tumbuhnya keberanian moral mahasiswa untuk menolak tindakan curang. Banyak mahasiswa yang sebelumnya cenderung mengikuti arus kelompok, kini berani mengatakan “tidak” pada ajakan untuk menyontek atau titip absen. Mereka juga mulai berani mengingatkan teman-temannya ketika melakukan penyimpangan kecil. Para dosen menilai bahwa mahasiswa menjadi lebih kritis dan berani mengungkapkan pendapat dalam diskusi tentang dilema etis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter antikorupsi berbasis dialog dan refleksi mampu menumbuhkan moral courage sebagai fondasi penting bagi generasi pendidik masa depan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala yang menghambat implementasi Pendidikan Antikorupsi secara optimal. Kendala pertama adalah budaya permisif di lingkungan kampus. Meskipun kesadaran mahasiswa meningkat, sebagian mahasiswa masih menganggap beberapa bentuk kecurangan, seperti titip absen atau berbagi jawaban saat ujian, sebagai hal yang wajar. Tekanan dari kelompok sebaya juga membuat sebagian mahasiswa ragu untuk menolak ajakan melakukan pelanggaran. Kendala kedua adalah metode pembelajaran yang dinilai masih terlalu teoritis. Mahasiswa menginginkan pembelajaran yang lebih aplikatif, seperti role play dilema etis, analisis kasus nyata dari KPK, simulasi pengambilan keputusan moral, atau menghadirkan narasumber praktisi antikorupsi. Minimnya variasi metode membuat internalisasi nilai terkadang tidak maksimal. Kendala ketiga berkaitan dengan sistem evaluasi, di mana dosen lebih menekankan penilaian kognitif dibandingkan penilaian afektif atau perubahan karakter. Penilaian karakter membutuhkan instrumen yang lebih kompleks seperti jurnal refleksi, observasi perilaku, dan portofolio etika, yang belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Kendala terakhir adalah lemahnya dukungan institusional. Mahasiswa berharap kampus lebih aktif menyelenggarakan seminar, workshop, kampanye integritas, serta memberikan sanksi akademik yang tegas terhadap pelanggaran kejujuran untuk menciptakan budaya antikorupsi yang kuat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan bahwa Pendidikan Antikorupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa, terutama dalam aspek integritas dan tanggung jawab moral. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh budaya kampus, metode pengajaran, evaluasi karakter, dan komitmen institusi. Dengan memperkuat faktor pendukung tersebut, Pendidikan Antikorupsi memiliki potensi besar untuk menjadi strategi utama dalam membangun generasi muda yang berintegritas tinggi dan mampu menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi sejak tingkat pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A., & Santoso, H. (2017). *Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Sagala, S. (2013). *Konsep dan makna pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A., & Tilaar, H. A. R. (2014). *Analisis kebijakan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aisyah, S. (2020). Internalization of anti-corruption values in higher education. *Journal of Civic Education*, 5(2), 123–137.
- Hidayat, R., & Prasetyo, Y. (2021). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun integritas mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 45–58.
- Kurniawan, D. (2019). Tantangan implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. *Jurnal Etika & Integritas*, 4(3), 201–215.
- Rahmawati, L. (2020). Academic dishonesty among university students: Causes and prevention. *Journal of Moral Education*, 8(1), 55–69.
- Wijayanti, F. (2021). University culture and students' integrity behavior. *Civic and Character Journal*, 6(2), 78–92.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Modul pendidikan antikorupsi perguruan tinggi*. Jakarta: KPK. <https://aclc.kpk.go.id>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). *Panduan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.